

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

**YULIANI SYAHPUTRI
NIM: 13622127**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Yuliani Syahputri
Nim : 13622127

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E. M.Ak. Ak.CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Afrivadi, ST.ME
NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Andy Satria, SE. M.Ak
NIDN.1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : YULIANI SYAHPUTRI
NIM : 13622127

Telah dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua
Ribu Dua puluh Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua



Nurfitri Zulaika, S.E. M.Ak. Ak.CA
NIDN . 1028117701 / Asisten Ahli

Sekretaris



Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Anggota



Budi Zulfachri, S.Si., M.Si
NIDN. 1028067301 / Asisten Ahli

TANJUNGPINANG, 7 AGUSTUS 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang

Ketua,



Linda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Yuliani Syahputri
NIM : 13622127
Tahun Angkatan : 2013
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan
Dan Pemanfaatan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, 30 Juli 2020

Penyusun,



Yuliani Syahputri
NIM : 13622127

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillahirabbil alamin....

Ya Allah atas izin dari-mu dan rasa syukur yang sangat mendalam saya persembahkan gelar sarjana saya ini dan semua karya saya ini kepada semua yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Hanya dengan izin-mu YA ALLAH akhirnya dapat saya selesaikan jenjang pendidikan S1 saya, untuk itu dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang yang tulus saya persembahkan kebahagiaan dan skripsi ini kepada mereka yang saya cintai.

Untuk kedua orang tua saya yang tercinta Papa Syahril dan Mama Ernita saya ucapkan terimakasih untuk semua yang telah diberikan untuk saya. Hanya doa yang terbaik yang dapat saya panjatkan kepada Papa dan Mama saya tercinta.

Dengan dukungan Papa dan Mama saya dapat menyelesaikan pendidikan saya ini.

Untuk Adik saya Muhammad Supri , Teman dekat dan Sahabat saya yang selalu menjadi penyemangat, penghibur serta doa agar senantiasa saya tidak putus asa dalam menyelesaikan karya ini.

Bapak dan Ibu dosen Pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas untuk memberikan bimbingan dan pelajaran yang sangat berharga agar saya

menjadi lebih baik kedepannya. Terimakasih Banyak Bapak dan Ibu atas ilmu yang telah diberikan semoga ilmu ini bermanfaat selalu bagi saya.

HALAMAN MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan
mendapatkannya”*

*“Berpikirlah positif dalam hidup dan itu akan membawamu
menuju hal yang baik”*

“Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

*“Jangan mudah menyerah kalau tidak akan merugikan diri
sendiri”*

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan ”

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Adapun judul penulisan skripsi yang penulis ambil adalah “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang”, disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Akuntansi Strata-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.CA selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.Ak.M.Si CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Kota Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Kota Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Kota Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA selaku dosen pembimbing satu yang sudah meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Afriyadi, S.T.,M.E selaku dosen pembimbing kedua yang sudah meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang.
10. Untuk Kedua Orangtua saya (Papa Syahril dan Mama Ernita) dan adik saya yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, dorongan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Untuk teman dekat,sahabat dan rekan kantor (Eko Indra.C., M. Ray, Pak Sapik, Ai Apriani, Aida Audina, Oriza Sativa, Sepriwarni Sianturi, Sesri Yenti, Meri Irawati, Lelys, Tiram, Desy Ochtafina.C.,Septi K, Kak Titin Wulansari, dan Teman-teman kantor saya) yang tiada hentinya memberikan motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Serta teman-teman saya terutama kelas M2 angkatan 2013 yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.

Tanjungpinang, 30 Juli 2020

Penulis

Yuliani Syahputri

NIM : 13622127

DAFTAR ISI

HAL

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Batasan Masalah.....	8
1.5. Kegunaan Penelitian	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	8
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teori	12
2.1.1. Pengertian Pemahaman.....	12
2.1.2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan.....	13
2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	13
2.1.2.2 Komponen Standar Akuntansi	
Pemerintahan.....	14
2.1.2.3 Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan.....	28

2.1.3.	Pengertian Pemanfaatan.....	32
2.1.4.	Sistem Informasi Akuntansi.....	33
2.1.4.1	Pengertian Sistem.....	33
2.1.4.2	Pengertian Informasi.....	34
2.1.4.3	Pengertian Akuntansi.....	34
2.1.4.4	Pengertian Sistem Informasi.....	35
2.1.4.5	Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.....	36
2.1.4.6	Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi	37
2.1.4.7	Karakteristik Sistem Informasi.....	39
2.1.5.	Kualitas Laporan Keuangan.....	42
2.1.6.	Kinerja Aparatur Pemerintahan.....	46
2.1.7.	Kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD)	52
2.1.8.	Kinerja Keuangan	54
2.1.8.1	Pengertian Kinerja Keuangan.....	54
2.1.8.2	Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan.....	55
2.1.8.3	Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan.....	57
2.2.	Kerangka Pemikiran	58
2.3.	Pengembangan Hipotesis	58
2.3.1.	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Tanjungpinang.....	58
2.3.2.	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	59
2.3.3.	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	

4.1.3.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	93
4.1.3.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	94
4.1.4.	Analisis Deskripsi Penilaian Responden	95
4.1.4.1.	Deskripsi Penilaian Responden Terhadap Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	96
4.1.4.2.	Deskripsi Penilaian Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2)	100
4.1.4.3.	Deskripsi Penilaian Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	101
4.1.5.	Hasil Analisis Data	102
4.1.5.1.	Uji Validitas Data	102
4.1.5.2.	Uji Reliabilitas Data	105
4.1.6.	Uji Asumsi Klasik	106
4.1.6.1.	Uji Normalitas	106
4.1.6.2.	Uji Autokorelasi	108
4.1.6.3.	Uji Multikolinearitas	110
4.1.6.4.	Uji Heterokedastisitas	110
4.1.7.	Uji Regresi Linier Berganda	112
4.1.8.	Uji Hipotesis	113
4.1.8.1.	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	113
4.1.8.2.	Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	116
4.1.8.3.	Koefisien Determinasi (R^2)	117
4.2.	Pembahasan	117

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	121
------	------------------	-----

5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1	Grafik Histogram	106
Gambar 4.2	Normal Probability Plot	107
Gambar 4.3	Tabel Durbin Watson.....	109
Gambar 4.4	Scatterplot Heterokedastisitas	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	70
Tabel 4.1	Karakteristik Jenis Kelamin Responden	93
Tabel 4.2	Karakteristik Usia Responden	94
Tabel 4.3	Karakteristik Pendidikan Responden	95
Tabel 4.4	Interval Kelas Variabel	96
Tabel 4.5	Penilaian Responden Terhadap Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	96
Tabel 4.6	Penilaian Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2)	100
Tabel 4.7	Penilaian Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	101
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	103
Tabel 4.9	Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2)	104
Tabel 4.10	Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	104
Tabel 4.11	Uji Reliabilitas	105
Tabel 4.12	Uji Autokorelasi	108
Tabel 4.13	Uji Multikolinearitas	110
Tabel 4.14	Uji Heterokedastisitas	112
Tabel 4.15	Uji T	114
Tabel 4.16	Uji F	116
Tabel 4.17	Koefisien Determinasi (R^2)	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS 22
Lampiran 4	Tabel Distribusi Jawaban Responden
Lampiran 5	Plagiarism <i>Checker X Originality Report</i>

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Yuliani Syahputri 13622127, Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
Yulianisyahputri0@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif dengan sampel penelitian berjumlah 33 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Regresi Linier Berganda lalu melakukan pengujian Hipotesis.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai signifikansi F sebesar 0.000. berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis H1 dan H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hasil uji koefisien determinasi untuk keseluruhan variabel didapat nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,808 yang menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2) sebesar 80,8%, dan sisanya 19,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya tidak diteliti dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

Dosen Pembimbing : 1. Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak. Ak. CA

Dosen Pembimbing : 2. Afriyadi, S.T., M.E

ABSTRACT

THE EFFECT OF UNDERSTANDING OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND USE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS TO THE QUALITY OF THE GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS OF THE CITY OF TANJUNGPINANG

Yuliani Syahputri 13622127, Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang
yulianisyahputri0@gmail.com

This study aims to determine whether the understanding of Government Accounting Standards and the use of Accounting Information Systems affect both partially and simultaneously the quality of the financial statements of the City Government of Tanjungpinang.

This type of research is a quantitative associative with a sample of 33 Financial Administration Officials (PPK) in the Regional Work Unit (SKPD) of Tanjung Pinang City. The sampling technique used is based on purposive sampling technique.

The type of data used in this study is to use primary data and secondary data while the data analysis technique used is the Multiple Linear Regression Test and then testing the Hypothesis.

The results showed that the significance value of F was 0,000. based on testing criteria that if the probability value <0.05 then the hypothesis H1 and H2 are accepted. So it can be concluded that the variable Government Understanding Accounting Standards (X1) and Utilization of Accounting Information Systems (X2) simultaneously have a significant effect on the Quality of Financial Statements (Y) of Tanjungpinang City Government. The coefficient of determination test results for all variables obtained Adjusted R square value obtained by 0.808 which shows that the Quality of Financial Statements (Y) of Tanjungpinang City Government is influenced by variables Understanding Government Accounting Standards (X1) and Utilization of Accounting Information Systems (X2) of 80.8 %, and the remaining 19.2% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Understanding of Government Accounting Standards, Utilization of Accounting Information Systems and Quality of Financial Statements

Instructor Lecturer : 1. Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak. Ak. CA

Instructor Lecturer : 2. Afriyadi, S.T., M.E.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat (Mardiasmo, 2016).

Dengan adanya laporan keuangan, baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Laporan keuangan perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaannya sehingga laporan keuangan tidak hanya melepas kewajiban belaka tetapi juga menjadikan laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan institusi.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar laporan keuangan lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan tidakfektifan (Yuliani et al., 2010).

Selain pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam

menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sari et al., 2014).

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai.

Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2018 tersebut, BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 327 dari 415 pemerintah kabupaten (79%), dan 84 dari 93 pemerintah kota (90%) (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah

provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada tahun 2019.

Sebanyak 99 LKPD belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Tiga akun terbesar yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2018 yaitu:

- a. Aset tetap pada 78 pemda, antara lain: (a) pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat; (b) aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain; dan (c) penambahan aset tetap setelah perolehan belum diatribusikan ke aset induk sehingga berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan.
- b. Aset lancar pada 48 pemda, antara lain: (a) saldo dana BOS tidak dicatat secara riil dan akurat, serta kas belum disajikan karena belum diverifikasi pertanggungjawabannya secara memadai; (b) piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi serta penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan; dan (c) penyajian saldo persediaan belum mencakup saldo persediaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- c. Belanja operasi pada 34 pemda, antara lain: (a) kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah; dan (b) belanja pegawai serta belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti

dokumen pencairan yang memadai serta tidak dilengkapi dengan laporan penggunaan dana. (BPK, 2019)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana sistem informasi akuntansi merupakan suatu sub sistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari pengelolaan rutin

atas transaksi akuntansi. Dengan memperhatikan sistem informasi akuntansi dari setiap SKPD, maka berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurpaída, Muslimin dan Kahar (2017) dan Defitri (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan variabel independen pemahaman standar akuntansi pemerintah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan variabel pemahaman akuntansi.
- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tanjungpinang. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sigi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok.
- c. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini berjudul ***“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

- a. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang?
- b. Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang?
- c. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- d. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- e. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh baik secara parsial

maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.4. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Luas lingkup penelitian ini hanya meliputi pengaruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- b. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dalam hal ini adalah SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.
- c. Penyebaran kuesioner diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada banyak hal positif yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu antara lain bagi:

1.5.1. Kegunaan Ilmiah

Menambah pengetahuan dan wawasan untuk peneliti mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tanjungpinang baik secara teoritis maupun aplikasinya di lapangan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, khususnya di bidang ilmu Akuntansi pada Pemahaman SAP, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan.
- b. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Tanjungpinang agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Bagi Peneliti. Menambah wawasan penulis tentang Pemahaman SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi serta pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan.
- d. Bagi Pembaca
 - 1) Sebagai bahan referensi dalam ilmu Ekonomi Akuntansi sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.
 - 2) Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penulisan hasil penelitian secara menyeluruh dan agar mudah dipahami, akan disusun suatu sistematika penulisan yang terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini digunakan penulis untuk menyajikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data serta teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini terdiri dari lima pokok bahasan utama. Pertama akan membahas secara ringkas gambaran umum Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kedua akan memuat karakteristik responden. Ketiga akan memuat analisis deskripsi mengenai variabel penelitian. Keempat tentang hasil pengukuran dan kelima memuat tentang hasil pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil pembahasan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan *testee* mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini *testee* tidak hanya hafal secara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Pemahaman menunjuk pada apa yang dapat seseorang lakukan dengan informasi yang didapatkan daripada yang diingat (Uno & Uma, 2010)

Di dalam taksonomi kognitif, terdapat tiga tingkatan perilaku pemahaman, yaitu: (Kuswana, 2012)

- a. Pertama, terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain. Biasanya akan melibatkan pemberian makna terhadap komunikasi dari suatu isolasi, meskipun makna tersebut dapat sebagian ditentukan oleh ide-ide yang muncul sesuai konteksnya.
- b. Kedua, merupakan interpretasi yang melibatkan komunikasi, sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memungkinkan memerlukan penataan kembali ide-ide ke dalam konfigurasi baru dalam pikiran individu.
- c. Ketiga, ekstrapolasi yang mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam

komunikasi. Situasi ini memungkinkan melibatkan pembuatan kesimpulan sehubungan dengan implikasi, konsekuensi, akibat, dan efek sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.

2.1.2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arikunto (2014) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Setiap organisasi atau entitas memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatannya, salah satunya yaitu dalam penyusunan laporan keuangan. Di pemerintah terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang patut dipahami dan dilaksanakan oleh setiap entitas pemerintahan.

2.1.2.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan ini dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang mana kerangka konseptual ini merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu

masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Entitas pelaporan di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua. Dari keterangan tersebut bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan perlu dipahami oleh semua pegawai yang berhubungan dengan keuangan terutama dengan laporan keuangan pemerintahan karena dapat membantu dalam penyusunan atau pembuatan laporan keuangan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

2.1.2.2. Komponen Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari beberapa pernyataan-pernyataan yang diantaranya yaitu:

- a. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP 03: Laporan Arus Kas
- d. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
- e. PSAP 05: Akuntansi Persediaan
- f. PSAP 06: Akuntansi Investasi
- g. PSAP 07: Akuntansi Asset Tetap
- h. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

- i. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi
- l. PSAP 12: Laporan Operasional
- m. PSAP 13. Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- n. PSAP 14. Akuntansi Aset Tidak Berwujud

Berikut penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai isi pernyataan-pernyataan standar akuntansi pemerintahan:

- a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

- 1) Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban

dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2) Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3) Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.

4) Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau

lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

1) Struktur Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) cakupan entitas pelaporan;
- c) periode yang dicakup;
- d) mata uang pelaporan; dan
- e) satuan angka yang digunakan.

2) Periode Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

d. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.

e. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2) Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

f. PSAP Tentang 06 : Akuntansi Investasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

1) Klasifikasi Investasi

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar.

2) Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

3) Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya:

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah harga perolehan.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

g. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

1) Klasifikasi Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan;

2) Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

3) Pengukuran Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

h. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2) Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

3) Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi.

i. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

1) Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

2) Pengakuan Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

3) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

j. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

1) Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. Koreksi

kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

3) Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- e) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

k. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

l. PSAP 12 tentang Pelaporan Operasional

Tujuan PSAP 12 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. PSAP 12 diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang

menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

m. PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

n. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. ATB sebagai aset harus memenuhi kriteria umum aset seperti dijelaskan dalam Kerangka Konseptual. Aset nonkeuangan artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik

tersebut bukan faktor utama dalam menentukan keberadaan ATB karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset pemerintah apabila pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah menguasai aset tersebut.

2.1.2.3. Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2015) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip standar akuntansi pemerintah ini akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur pemahaman standar akuntansi pemerintah di SKPD Kota Tanjungpinang. Menurut Mahmudi (2015) ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai

kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan.

Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat

diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis dapat menggunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapatkan penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Periodisitas (*periodity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang

digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*fair presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, unsur kehati-hatian diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan. Misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2.1.3. Pengertian Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Nasional, 2012) pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau obyek.

Menurut Davis (2013) mendefinisikan kemanfaatan (*usefulness*) sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi orang tersebut. Pengukuran kemanfaatan tersebut berdasarkan frekuensi dan diversitas teknologi yang digunakan. Kemanfaatan dapat berupa kemanfaatan satu faktor seperti pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan meningkatkan kinerja pekerjaan.

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

2.1.4. Sistem Informasi Akuntansi

2.1.4.1. Pengertian Sistem

Aktivitas di dalam suatu perusahaan merupakan wujud dari suatu sistem, pelaksanaan rutinitas menjadi subsistem yang saling bekerjasama dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam sebuah sistem. Menurut Susanto (2013) pengertian sistem adalah kumpulan/*group* dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Menurut Krismiaji (2015) pengertian sistem adalah rangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan, yang memiliki karakteristik meliputi; komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan; proses, kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem; tujuan, sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.

Menurut Gelinis et. al. (2012) pengertian sistem adalah seperangkat elemen yang saling bergantung bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan komponen-komponen yang saling terhubung dan berinteraksi yang bertujuan mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.4.2. Pengertian Informasi

Menurut Susanto (2013) pengertian informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Jadi, informasi merupakan hasil dari pengelolaan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengelolaan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil pengelolaan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.

Menurut Krismiaji (2015) pengertian informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. Menurut Gelinis et. al. (2012) pengertian informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna dalam kegiatan pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data-data yang memiliki arti dan berguna, kemudian diubah maupun diproses sesuai kebutuhan untuk memberikan arti dalam kegiatan pengambilan keputusan.

2.1.4.3. Pengertian Akuntansi

Menurut Susanto (2013) pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas operasi/peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Menurut Soemarso (2013) pengertian akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisarian dalam kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan untuk menyajikan informasi ekonomi untuk dilaporkan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya.

2.1.4.4. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Krismiaji (2015) pengertian sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasikan untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Satzinger et. al. (2010) pengertian sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas bisnis. Menurut Gelinas et. al. (2012) pengertian sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri dari seperangkat komponen terintegrasi berbasis komputer dan komponen pengguna yang dibentuk untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dan memberikan informasi output ke pengguna.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling

berinteraksi atau tergantung satu sama lain dan kombinasi terpadu dari pengguna, piranti keras, piranti lunak, komunikasi jaringan, dan sumber-sumber data yang mengumpulkan, memproses dan mendistribusikan informasi.

2.1.4.5. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Susanto (2013) pengertian sistem informasi akuntansi adalah kumpulan atau integrasi dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Menurut Dasaratha dan Jones (2008) pengertian sistem informasi akuntansi adalah subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari proses rutin atas transaksi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart (2014) pengertian sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi yang mengumpulkan, memproses dan menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan transaksi akuntansi perusahaan.

2.1.4.6. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan utama dibangun sistem informasi akuntansi adalah untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi sumber akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan (Susanto, 2013). Menurut Susanto (2013) fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari

Suatu perusahaan agar tetap eksis maka harus terus beroperasi dengan melakukan jumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut dengan transaksi, seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan. Ada dua macam transaksi yaitu transaksi akuntansi dan non akuntansi. Transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berakibat adanya pertukaran antara sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan tersebut, seperti peristiwa terjadinya penjualan dan pembelian barang oleh perusahaan. Transaksi non akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tapi peristiwa tersebut tidak menimbulkan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan tapi peristiwa tersebut tidak menimbulkan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Seperti memasukkan data order pembelian ke komputer dan menyiapkan barang untuk dikirim.

b. Mendukung proses pengambilan keputusan

Tujuan yang sama pentingnya dalam sistem informasi adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan

harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Informasi yang tidak dapat diperoleh dari sistem informasi akuntansi tapi diperlukan dalam proses pengambilan keputusan biasanya berupa informasi kuantitatif yang tidak bersifat uang dan data kualitatif. Informasi ini dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan sistem informasi manajemen, karena sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi perusahaan keseluruhan sedangkan sistem informasi akuntansi merupakan bagian terbesar dari sistem informasi manajemen dan informasi akuntansi yang dihasilkan bersifat detail.

- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal

Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab buku. Salah satu tanggung jawab penting keharusan memberi informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau stakeholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analisis keuangan, assosiasi industri, atau bahkan publik secara umum.

Menurut Hall (2013) tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung fungsi pekerjaan dari manajemen. Pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah mengenai tanggung jawab dari pihak manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi mengenai pemakaian sumber daya kepada pengguna eksternal dengan menggunakan laporan keuangan dan laporan lainnya.

- b. Untuk mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen. Sistem informasi akuntansi memberikan informasi yang penting untuk digunakan manajer dalam membuat keputusan bagi perusahaannya.
- c. Untuk mendukung kegiatan sehari-hari perusahaan. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi kepada pegawai untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan efektif dan efisien.

Menurut Hall (2013) selain memiliki tujuan, sistem informasi akuntansi akan melaksanakan fungsi utamanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan;
- b. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen;
- c. Memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan;
- d. Mengendalikan pengendalian data yang cukup sehingga asset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga;
- e. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengendalikan aktivitas

2.1.4.7. Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Susanto (2013) peran mendasar sistem informasi akuntansi dalam organisasi adalah menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas tentu akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat yang akan langsung memengaruhi kelangsungan hidup suatu organisasi.

Sedangkan menurut Laudon dan Laudon (2013) sistem informasi yang berkualitas merupakan sistem informasi yang memadukan efisiensi teknis dengan kepekaan terhadap kebutuhan manusia dan organisasi, menyebabkan tingginya kepuasan kerja dan produktivitas (*an information system that blends technical efficiency with sensitivity to organizational and human needs, leading to higher job satisfaction and productivity*).

Menurut Hall (2013) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Relevan

Informasi yang relevan merupakan informasi yang perlu diketahui untuk memberikan pemahaman yang baru. Laporan yang hanya bersifat sementara dan selanjutnya tidak relevan harus dihentikan pembuatannya.

b. Tepat Waktu

Umur informasi merupakan faktor yang kritikal dalam menentukan kegunaannya. Informasi harus tidak lebih tua dari periode waktu tindakan yang didukungnya.

c. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan yang sifatnya material. Kesalahan-kesalahan material ada ketika jumlah informasi yang tidak akurat menyebabkan pemakainya melakukan keputusan yang buruk atau gagal melakukan keputusan yang diperlukan.

d. Lengkap

Tidak ada bagian informasi yang esensial bagi pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang. Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kesulitan, karena informasi yang tidak disertakan itu akan menjadi unsur ketidakpastian yang benar.

e. Ringkas

Informasi harus diintegrasikan agar sesuai dengan kebutuhan pemakai. Informasi yang ringkas dan mengikhtisarkan data yang relevan menunjukkan bidang-bidang penyimpangan terhadap tingkat normal, standar, atau yang direncanakan merupakan bentuk informasi yang banyak diperlukan oleh para pemakai informasi akuntansi.

Menurut Susanto (2013) secara umum informasi akuntansi memiliki empat dimensi kualitas informasi, yaitu:

a. Akurat

Dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut benar-benar mencerminkan situasi dan kondisi yang ada .

b. Relevan

Dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan .

c. Tepat waktu

Dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan.

d. Lengkap

Dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan tersebut telah selengkap yang diinginkan dan dibutuhkan.

2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang menunjukkan kinerja dari Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan kepadanya dalam mengelola organisasi yang ada di bawah kepemimpinannya. Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar yang diukur berbasis kadar ketidakpastian dan dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2013).

Laporan keuangan sektor publik berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta. Pada hakekatnya, laporan keuangan digunakan penggunaannya untuk pengambilan keputusan serta mengadakan evaluasi atas sumber daya yang digunakan. Kualitas laporan keuangan daerah diartikan oleh sebagai suatu proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Ivan Permana, 2011). Oleh karena itu, pemerintah selaku penyedia laporan keuangan daerah harus menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah pemerintah memerlukan suatu standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut.

Adapun karakteristik kualitatif dari laporan keuangan terbagi menjadi beberapa hal (Bastian, 2014) yaitu:

a. Kualitas Tertinggi: dapat dipahami dan berguna.

- b. Kualitas Primer: relevan (nilai prediksi, tepat waktu, nilai umpan balik), andal (daya uji, netral, tepat saji).
- c. Kualitas Sekunder: konsisten, komparatif.
- d. Kendala: materialitas, konservatif, biaya manfaat.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP menjelaskan definisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan angka 16 untuk pengguna laporan keuangan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Masyarakat,
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa,
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan
- d. Pemerintah.

Informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh sebab itu, laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna, namun disajikan setidaknya-tidaknnya mencakup jenis laporan dan informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan satu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. Bahwa alasan penggunaan periode laporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti laporan arus kas dan catatan lain yang terkait tidak dapat dibandingkan.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan SAP hanya berlaku untuk laporan keuangan dan bukan untuk informasi lainnya yang disajikan dalam suatu laporan tahunan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan informasi lainnya yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam pernyataan standar ini. Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

- a. Relevan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil koreksi masa lalu. Dengan demikian informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud

penggunaannya. Adapun informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback*);
- 2) Memiliki manfaat prediksi (*predictive value*);
- 3) Tepat waktu (*Timeliness*);
- 4) Lengkap (*Completeness*).

b. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial akan menyesatkan, informasi yang andal harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Disajikan secara jujur;
- 2) Dapat diverifikasi;
- 3) Netralitas.

c. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan di periode sebelumnya atau laporan keuangan lainnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para penggunanya dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna yang diasumsikan memiliki pengetahuan atas kegiatan dan lingkungan operasi

entitas pelaporan. Pentingnya kualitas dari laporan keuangan akan berguna untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi. Bagi pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu kewajiban. Kualitas laporan keuangan daerah akan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indikator dari laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.6. Kinerja Aparatur Pemerintah

Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja aparatur akan sulit terbentuk. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Wibowo (2016) mengatakan bahwa kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance*

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Hasil kerja yang dicapai oleh aparatur suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact* dengan tanggungjawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggungjawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2016) mengatakan bahwa: pengertian *performance* sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja/prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.

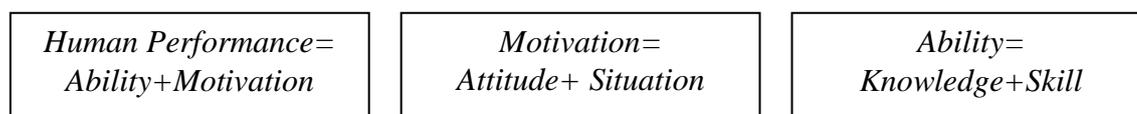
Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seorang aparatur menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya diaplikasikan dalam perilaku, kecerdasan, dan kemampuan sesuai dengan peranan, kegiatan dan tugas yang telah ditentukan.

Pengertian lain menurut Hasibuan (2016) bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Untuk mencapai sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. Aparatur merupakan persamaan dari karyawan, hanya saja dapat dibedakan bahwa aparatur adalah pekerja yang digaji oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, sedangkan karyawan adalah pekerja yang digaji oleh perusahaan untuk melayani masyarakat. Mangkunegara (2013) mengatakan bahwa kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Kenyataannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan tidaklah mudah, banyak hambatan-hambatan yang harus dilewati. Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2013) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, faktor tersebut berasal dari faktor kemampuan dan motivasi aparatur. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*), yang dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja



Sumber: (Mangkunegara, 2013)

Berdasarkan pengertian di atas, aparatur dalam pencapaian kinerja harus memiliki kemampuan dan motivasi kerja. Kemampuan yang dimiliki aparatur dapat berupa kecerdasan ataupun bakat. Hasil kerja yang dicapai oleh aparatur suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact* dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggungjawab akan menyebabkan peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Kinerja aparatur sebagai salah satu dimensi dari administrasi publik masih menjadi isu penting yang banyak dibicarakan baik oleh para akademisi maupun praktisi karena di samping merupakan substansi utama dalam akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh setiap institusi negara, juga menjadi parameter keberhasilan pencapaian tujuan negara.

Kinerja Aparatur negara sebagai instrumen pilar pengemban amanah pencapaian masyarakat adil dan makmur hingga saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama karena kesulitan dalam menyeimbangkan tiga tuntutan kebutuhan yang kadang-kadang seiring tapi tidak sejalan yaitu tuntutan kebutuhan politis, tuntutan kebutuhan profesionalisme dan tuntutan kebutuhan hidup layak.

Penggunaan teknologi dan informasi pada lembaga pemerintah akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna. Peningkatan tersebut tidak akan lancar, jika tidak diimbangi dengan kinerja yang efektif. aparatur negara untuk

meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusianya, serta terwujudnya kepegawaian negara yang berkualitas, memiliki kemampuan profesional keahlian dan keterampilan, kepemimpinan, serta semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi taat dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terdapat dua belas indikator kinerja aparatur, dua diantaranya mempunyai peran sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja aparatur ditentukan oleh tujuan organisasi yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Namun, kinerja memerlukan adanya dukungan, sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik.

Menurut Istiyani dalam Nina (2014) indikator kinerja aparat pemerintah daerah adalah:

- a. Penetapan target permulaan rencana serendah mungkin;
- b. Target mudah dicapai;
- c. Revisi target anggaran yang ditetapkan setelah berjalan 6 bulan;
- d. Pengetahuan penyebab penyimpangan anggaran kelompok maupun individu;
- e. Kerja keras untuk mencapai target setelah direvisi;
- f. Atasan saya kritis terhadap penentuan target;
- g. Proyek-proyek mengikuti kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat;
- h. Pertimbangan atas kebutuhan dan prioritas masyarakat pada saat merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek;

- i. Penilaian kinerja berdasarkan pada capaian target;
- j. Penilaian kinerja karena pengendalian dan pengawasan;
- k. Penilaian kinerja karena dapat dipertanggungjawabkan;
- l. Pengetahuan perkembangan rencana dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun.

Indikator kinerja Aparatur sebagaimana disebutkan di atas mengandung makna bahwa tujuan bukanlah persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan. Namun demikian dalam upaya mencapai tujuan perlu adanya sebuah standar. Tanpa standar, tidak akan dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

Kinerja Aparatur umpan balik dilakukan sebagai evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja, sementara itu alat dan sarana akan berguna sebagai pendukung kelancaran pencapaian tujuan. Tanpa alat dan sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Kinerja aparatur merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun menurut pendapat ahli lain pengertian kinerja aparatur merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi.

Kinerja aparatur menurut Mangkunegara (2013) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur merupakan penilaian terhadap hasil kerja aparatur secara kualitas dan kuantitas mengenai tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan, hal yang paling utama adalah pencapaian hasil kerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.7. Kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

Menurut Rivai (2013), kata kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang berasal dari kata *to perform* dengan beberapa entries, yaitu: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (*to do or carry out, execute*); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu unit (*to discharge of fulfil; as vow*); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggungjawab (*to execute or complete an understanding*) dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang atau mesin (*to do what is expected of a person machine*).

Mangkunegara (2013) menyatakan bahwa kinerja Sumber Daya Manusia adalah istilah yang berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (Prestasi Kerja) yang berarti hasil kerja baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, Sedarmayanti (2016) menyatakan bahwa kinerja adalah penggunaan sistem dalam menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara menyeluruh atau merupakan perpaduan hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).

Kinerja berkaitan dengan pencapaian hasil kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut teori di atas, kinerja antara lain dipengaruhi oleh motivasi, yaitu keinginan/dorongan dalam melaksanakan pekerjaan; kemampuan, yaitu kondisi karyawan di mana karyawan tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya; pengetahuan, yaitu mengenai ilmu pengetahuan yang diketahui karyawan; keahlian, yaitu: keterampilan yang dimiliki oleh karyawan; pendidikan, yaitu: pendidikan akademis yang dimiliki oleh karyawan; pengalaman, yaitu: pekerjaan tersebut pernah dilakukan oleh karyawan; minat, yaitu keinginan karyawan atas pekerjaan tersebut; sikap kepribadian, yaitu sikap tanggungjawab dan jujur dalam melaksanakan suatu pekerjaan; kondisi fisik, yaitu keadaan fisik pegawai yang sehat; kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti: kebutuhan psikologi, keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian kinerja ASN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penulis berkesimpulan bahwa Kinerja PPK SKPD merupakan hasil kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK SKPD di mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inilah yang akan menjadi tolok ukur dari kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan. Adapun tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan adalah meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.

2.1.8. Kinerja Keuangan

2.1.8.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo et. al. (2002) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.1.8.2. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk (Munawir, 2014):

- a. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan promosi, transfer dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

2.1.8.3. Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Ada 5 (lima) tahap dalam

menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum (Fahmi, 2012) yaitu:

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:
 - 1) *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - 2) *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada

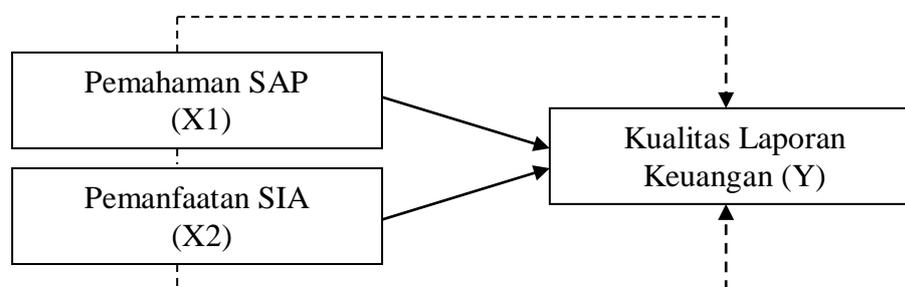
dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

- d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap analisis ini kinerja keuangan perusahaan dilihat setelah dilakukan ketiga tahap di atas tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh organisasi tersebut.
- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2019

Keterangan:

_____ = Pengujian variabel secara parsial (pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat).

----- = Pengujian variabel secara simultan (pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat).

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bagaimana pengaruh masing-masing variabel secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen serta dapat digambarkan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al. dalam Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah

daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurpaida et. al. (2017) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan audit internal secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi.

H1: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3.2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Nurillah (2014) menyimpulkan pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dimana semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data

transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2016) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H2: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.3.3. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Menurut Permana (2011) belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi

memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan). Selain pemahaman terhadap SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut pendapat Deddi Nordiawan dalam Permana (2011) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sar, Adiputra dan Sujana (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan

sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

H3: Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4. Penelitian Terdahulu

a. Yusar Sagara (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Sagara (2015), *Research Journal of Finance and Accounting*, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.10. Berjudul “*The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan, metode yang digunakan adalah metode penelitian survei deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit kerja semua pemerintah daerah di Lebak Banten Indonesia. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner di mana setiap item yang diteliti diukur menggunakan skala *likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan secara simultan (2) penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan (3) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan

keuangan. Penelitian ini akan menggunakan uji t dengan $\alpha = 0,03$ untuk menguji hipotesis.

b. Siska Yulia Defitri (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2016), *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*. Politeknik Negeri Padang, 15 – 16 Oktober 2016, ISSN:2541-111x. Berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi penelitian ini adalah 41 orang Satuan Kerja Daerah Kota Solok. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling. Jenis penelitian data adalah data primer. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur kualitas data adalah tes validitas dan uji reliabilitas. Kualitas data dianalisis menggunakan program SPSS. Analisis data yang digunakan untuk menguji variabel penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Andi Nurpaida, Muslimin dan Abdul Kahar (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurpaida et. al. (2017), e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 67-77, ISSN: 2302-2019. Berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja pemerintah (SKPD) di Kabupaten Sigi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menjawab hipotesis dengan teknik statistik dengan tes dilakukan pada 27 unit unit pemerintah daerah dengan memilih 54 responden yang terdiri dari pengguna anggaran dan pejabat administrasi keuangan di SKPD Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan audit internal secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Sigi. Ini berarti bahwa ketika standar akuntansi pemerintah dan audit internal diterapkan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan juga akan lebih baik.

d. Irzal Tawaqal, Suparno (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal dan Suparno (2017), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 4, (2017) Halaman 125-135. Berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem

informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja (SKPD) di Pemerintah Kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah semua unit kerja (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (39 SKPD) dengan 2 responden dari setiap unit kerja dengan total 78 responden. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian didapat bahwa koefisien nilai regresi ($\beta_1 = 0,389$) dimana β_1 sebagai variabel penerepan sistem informasi akuntansi maka, H_0 dapat diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh. Koefisien nilai regresi ($\beta_2 = 0,038$) dimana β_2 sebagai variabel sistem pengendalian internal maka, H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh. Koefisien nilai regresi ($\beta_3 = 0,107$) dimana β_3 sebagai variabel kompetensi sumber daya manusia maka, H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini dapat mendukung hipotesis secara bersamaan atau sebagian bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi laporan keuangan satuan kerja (SKPD) di Pemerintah Kota Banda Aceh.

e. Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono dan Windu Mulyasari (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et. al. (2018), Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.12 No.1, 2018 Hal. 40-63. Berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi dan Pemahaman Basis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman atas sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Kuesioner disampaikan kepada 90 pegawai di 15 OPD Provinsi Banten yang bekerja di bagian keuangan/akuntansi, sebanyak 82 kuesioner (91,1%) kembali, 16 kuesioner (19,5%) tidak dapat diolah, dan 66 kuesioner (80,4%) dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program software SPSS 20. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman atas sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sedangkan kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti, dinamakan data primer (Hariwijaya & Triton, 2011). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada sampel.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel ataupun dalam bentuk diagram-diagram (Hariwijaya & Triton, 2011). Dalam penelitian

ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangatlah penting, biasa juga dikatakan sebagai teknik untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis diantaranya:

3.3.1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Sugiyono, 2016).

3.3.2. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2016), teknik pengolahan data hasil kuesioner menggunakan skala *likert* dimana alternatif jawaban nilai positif 5 sampai dengan 1. Pemberian skor dilakukan atas jawaban responden kemudian diberi skor dengan menggunakan skala *likert*, seperti pada tabel berikut ini:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) SS (Sangat Setuju) = 5 | 4) TS (Tidak Setuju) = 2 |
| 2) S (Setuju) = 4 | 5) STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 |
| 3) R (Ragu-ragu) = 3 | |

3.3.3. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Hadi dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan kunjungan dan pengamatan langsung pada SKPD di Kota Tanjungpinang. Hal ini sudah dilakukan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

3.4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016) yang dimaksud dengan populasi adalah jumlah keseluruhan unit yang akan diselidiki karakteristik atau ciri-cirinya. Keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, peristiwa sebagai sumber data yang menilai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Populasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah semua Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teknik sampel jenuh yang berarti teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif

kecil, kurang dari 30 atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2016). Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel yaitu sebanyak 33 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dari 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang. Data populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

NO	UNIT KERJA	POPULASI	SAMPEL
1	Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	1	1
2	Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang	1	1
3	Sekretarian Dewan Pengurus KORPRI Kota Tanjungpinang	1	1
4	Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang	1	1
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	1	1
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang	1	1
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang	1	1
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang	1	1
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang	1	1
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang	1	1
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang	1	1
12	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang	1	1
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	1	1
14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang	1	1
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang	1	1
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang	1	1

NO	UNIT KERJA	POPULASI	SAMPEL
17	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	1	1
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang	1	1
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang	1	1
20	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang	1	1
21	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	1	1
22	Dinas Sosial Kota Tanjungpinang	1	1
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang	1	1
24	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang	1	1
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang	1	1
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang	1	1
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	1	1
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang	1	1
29	Satuan Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Kota Tanjungpinang	1	1
30	Kecamatan Tanjungpinang Kota Tanjungpinang	1	1
31	Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang	1	1
32	Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang	1	1
33	Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	1	1
	JUMLAH	33	33

Sumber: Data Primer, 2019

3.5. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini definisi operasional yang akan dijelaskan penulis adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y).

3.5.1. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1), indikator Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan adanya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan akan menghasilkan informasi akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan laporan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah diukur menggunakan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu:

- a. PSAP 01. Penyajian Laporan Keuangan;
- b. PSAP 02. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
- c. PSAP 03. Laporan Arus Kas;
- d. PSAP 04. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. PSAP 05. Akuntansi Persediaan;
- f. PSAP 06. Akuntansi Investasi;
- g. PSAP 07. Akuntansi Aset Tetap;
- h. PSAP 08. Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan;
- i. PSAP 09. Akuntansi Kewajiban;

- j. PSAP 10. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
- k. PSAP 11. Laporan Keuangan Konsolidasian;
- l. PSAP 12. Laporan Operasional;
- m. PSAP 13. Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. PSAP 14. Akuntansi Aset Tidak Berwujud.

3.5.2. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2)

Sistem Informasi Akuntansi (X2), indikator Sistem Informasi Akuntansi menurut Menurut Hall (2013) adalah sebagai berikut:

- f. Relevan;
- g. Tepat Waktu;
- h. Akurat;
- i. Lengkap;
- j. Ringkas;

3.5.3. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan indikator kualitas laporan keuangan adalah:

- b. Relevan;
- c. Andal;
- d. Dapat dibandingkan;
- e. Dapat dipahami;

3.6. Teknik Pengolahan Data

Apabila telah ditentukan data apa yang diperlukan, dari mana data tersebut didapatkan, dengan cara apa data didapatkan, maka peneliti telah dapat untuk melakukan pengumpulan data (Achmadi & Cholid, 2013). Di dalam penelitian ini, tahap pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

3.6.1. Pengeditan (*Editing*)

Proses pengeditan di dalam penelitian ini merupakan proses yang bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat:

1. Memberikan kejelasan sehingga mudah dibaca, hal ini memiliki pengertian bahwa pengeditan data yang sempurna akan membuatnya lebih jelas dan mudah dibaca sehingga membuat data mudah dimengerti.
2. Konsisten, hal ini memiliki pengertian bahwa bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden dan pengecekan konsistensi dapat mendeteksi jawaban-jawaban yang keliru/salah.
3. Lengkap, hal ini memiliki pengertian bahwa seberapa banyak data yang hilang dari kuesioner atau wawancara yang telah dilakukan. Data yang hilang kemungkinan besar dikarenakan responden menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu.

3.6.2. Pemberian Kode (*Coding*)

Proses pemberian kode dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memberikan kode tertentu terhadap bermacam-macam jawaban dari kuesioner yang telah disebar guna dikelompokkan pada kategori yang sama. Pengkodean ini

berarti menerjemahkan data kedalam kode dan secara lebih lanjut akan dianalisis melalui program komputer.

3.6.3. Pemberian Skor (*Scoring*)

Proses penentuan skor atas jawaban yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang sesuai dengan anggapan atau pendapat dari responden. Dalam penelitian ini, proses dilakukan dengan memberikan tingkatan skor. Skor pengukuran dengan menggunakan skala *Likert*. Skala *likert* dalam Sugiyono (2016) yaitu dengan menghitung bobot setiap pertanyaan.

3.6.4. Tabulasi (*Tabulating*)

Pada penelitian ini, tabulasi merupakan tahap pengumpulan data dengan pengelompokan atas jawaban yang diteliti ke dalam bentuk tabel. Dengan adanya tabulasi, dapat diketahui jumlah individu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat dianalisis secara kualitatif.

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas menurut Sugiyono (2016) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau di atas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Syarat minimum untuk di anggap suatu butir instrumen dikatakan valid adalah nilai indeks valid yaitu nilai

indeks validitasnya $\geq 0,3$ (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, semua pernyataan yang memiliki tingkat korelasi di bawah 0,3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid.

Selanjutnya, kesahihan alat ukur dapat menggunakan uji reliabilitas. Reliabilitas sebenarnya merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau *construct*. Menurut Ghazali (2013), uji reliabilitas merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menguji sejauh mana pengukuran memberikan hasil yang relatif stabil bila dilakukan pengukuran kembali. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut sosial psikologis seperti sikap, perilaku dan kecenderungan. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS 22 *for Windows*, dimana suatu *construct* atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,6$.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Ada empat jenis pengujian dalam uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, nilai residual, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2013).

Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval ataupun rasio. Jika menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika tidak normal maka metode yang biasa digunakan adalah Non Parametrik. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika $d < dl$ atau $> (4-dl)$, maka artinya terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara du dan $(4-du)$, maka artinya tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dl dan du atau di antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. (Ghozali, 2013).

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi, syaratnya yaitu tidak adanya multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang besarnya

di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2013).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan homoskedastisitas. Sebuah model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Menurut Ghozali (2013) untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu “deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di atas di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Maka dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (*point-point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3. Analisis Statistik

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_n$) dengan variabel

(Y). Analisis data dalam penelitian ini digunakan uji statistik regresi berganda (*multiple regression*). Dalam hubungan dengan penelitian ini, variabel independen adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2) sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Dimana:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- α = konstanta dari persamaan regresi
- β_1 = koefisien regresi dari variabel X1, Pemahaman SAP
- β_2 = koefisien regresi dari variabel X2, Pemanfaatan SIA
- X1 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah
- X2 = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

3.7.4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel dependen, dengan $\alpha = 5\%$ (Ghozali, 2013). t hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$t \text{ hitung} = \frac{B_i}{S_{b_i}}$$

Dimana :

b_i = koefisien regresi variabel i

S_{b_i} = standar error variabel i

c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Hasil uji kelayakan model (Uji Statistik F) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. ANOVA (*Analisis of Variance*) dapat digunakan untuk melakukan uji signifikansi simultan (Ghozali, 2013). F Hitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$F \text{ Hitung} = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) / (n-k-1)}$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data atau kasus

k = jumlah variabel independen

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Cholid, N. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK. (2019). *Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester I*. Jakarta.
- Dasaratha, R. V., & Jones, F. L. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Davis, G. B. (2013). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Palembang: Maxicom.
- Defitri, S. Y. (2016). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Gelinas, J. U., Dull, R. B., & Wheeler, P. R. (2012). *Accounting Information Systems*. South Western: Cengage Learning.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (7th ed.). Semarang: UNDIP.
- Hall, J. A. (2013). *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariwijaya, & Triton. (2011). *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Hasibuan, S. . M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Revisi). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indonesia.
- Indriyo, A., Gitusudarmo, & Basri. (2002). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPF.

- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuswana, W. S. (2012). *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. (2013). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Azhar Maksum, Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). *The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(20).
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nina, G. (2014). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota)*. ARTIKEL ILMIAH.
- Nurillah, A. S. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Nurpaida, A., Muslimin, & Kahar, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi*. *E-Journal Katalogis*, 5(1).
- Permana, I. (2011). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan*

Implikasinya Pada Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Bandung. Universitas Komputer Indonesia.

- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2018). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten).* *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Rivai, V. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek.* Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (13th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Sagara, Y. (2015). *The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting.* *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(10).
- Sari, M., Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2014). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Kabupaten Jembrana).* *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Satzinger, Jackson, & Burd. (2010). *System Analysis and Design with the Unified Process.* USA: Course Technology, Cengage Learning.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Revisi).* Bandung: PT. Refika Adiatama.
- Soemarso. (2013). *Akuntansi Suatu Pengantar (Edisi Revi).* Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, T. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang).* Universitas Diponegoro Semarang.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi.* Bandung: Lingga Jaya.

Uno, H. B., & Uma, M. K. (2010). *Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran: Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja* (5th ed.). Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220.

CURRICULUM VITAE



NAMA : Yuliani Syahputri

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 15 Juli 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Perum. Kijang Kencana 3 Blok b No 214

Agama : Islam

Pekerjaan : PT. Bina Mandiri

Alamat Email : Yulianisyahputri0@gmail.com

Telepon/hp : 085265418500

NO	RIWAYAT PENDIDIKAN	TAHUN
1	TK EKADYASA	2000 – 2001
2	SD NEGERI 002 TANJUNGPINANG TIMUR	2001 – 2007
3	SMP NEGERI 7 TANJUNGPINANG	2007 – 2010
4	SMA NEGERI 3 TANJUNGPINANG	2011 – 2013
5	STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG	2013 – 2020